

## Perbandingan Pendekatan Ekonomi-Politik Media dan Studi Kebudayaan dalam Kajian Komunikasi Massa

S. Sarwoprasodjo-Agung

Staf Pengajar Mayor Komunikasi Pembangunan, FEMA IPB, Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga

Fenomena media massa sebagai bagian dari kebudayaan dan kehidupan sosial semakin meningkat. Kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi para peneliti media massa untuk mengembangkan konsep-konsep yang memungkinkan untuk memahami gejala tersebut dengan baik. Dua kelompok pendekatan kritis yakni ekonomi politik media dan studi kebudayaan mempunyai kesamaan, kelebihan dan kekurangan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut kedua pendekatan dapat saling belajar untuk memperkaya pendekatan masing-masing. Bagi pendekatan ekonomi politik media yang cenderung melihat dari satu sisi yakni produksi dan distribusi media, pendekatannya dapat diperbaiki dengan menambah satu sisi yakni konsumsi oleh khalayak dengan memberi perhatian pada kebebasan khalayak dalam menginterpretasi. Sedangkan bagi studi kebudayaan adalah dengan memberi perhatian pada aspek ekonomi-politik dan metodologi empirisme dalam etnografi. Dengan demikian, kajian terhadap media massa perlu mengembangkan pendekatan multiperspektif yang mencakup beragam artifak dengan mengumpulkan informasi secara mendalam tiga dimensi yakni (1) produksi dan ekonomi politis dari budaya (2) analisis tekstual dan kritik terhadap artifaknya dan (3) kajian mengenai penerimaan khalayak dan penggunaan produk budaya/media secara polisemi dengan metode pengumpulan data empiris.

Di dalam era informasi, peran media massa dalam kehidupan manusia menjadi sangat sentral. Sehingga kajian

mengenai peran media dalam kehidupan manusia menjadi penting. Berbagai pendekatan terhadap penelitian media yakni pendekatan yang sifatnya fungsionalis, pluralis dan kritis. Dalam pendekatan kritis yakni yang diwakili dengan terminologi pendekatan Marxisme terdapat tiga kelompok pendekatan yakni pendekatan strukturalist, ekonomi-politik dan pendekatan kulturalis.

Seperti halnya dalam pendekatan ekonomi politik, dalam studi kebudayaan terdapat berbagai varian yang antara lain ditunjukkan dengan pengelompokan berikut: dekonstruksi, rekonstruksi dan strukturalis. Pengelompokan lainnya (Golding dan Murdock, 1996) adalah analisis teks, analisis relasional dan supremasi khalayak.

Secara historis, kedua pendekatan tersebut mempunyai kesamaan yakni mendapat pengaruh dari Marxis, namun demikian dalam perkembangannya studi kebudayaan meninggalkan ekonomi politik media, sehingga sulit dicari persinggungan di antara keduanya. Sementara itu, pendekatan ekonomi-politik menunjukkan sikap keterbukaannya untuk “mendekati” studi kebudayaan yang ditunjukkan oleh telaah Mosco (1996) melalui *integral epistemology*-nya. Salah satu yang diungkapkannya adalah bahwa ekonomi-politik merupakan salah satu *entry point* untuk mempelajari studi kebijakan dan studi kebudayaan atau ekonomi politik media.

Berangkat dari pemikiran Mosco tersebut, penulis bermaksud membandingkan kedua pendekatan kajian tersebut dengan mempelajari masing-masing disiplin, sehingga memungkinkan memperkaya kedua kajian tersebut. Di dalam tulisan ini, upaya untuk mempelajarinya dimulai dengan menguraikan masing-masing kajian yakni sejarah perkembangan, karakteristik dan varian-varian serta kritik-kritiknya. Setelah itu, dicari titik temu di antara keduanya dengan melihat varian-varian dari masing-masing pendekatan yang relatif “berdekatan” dan membandingkannya dengan melihat persamaannya dan kelebihan/kekurangan masing-masing dan kemungkinan untuk mengintegrasikannya. Untuk mengintegrasikannya dimulai dengan analisis ekonomi-politik media, karena ciri pendekatannya cenderung lebih terbuka dibandingkan dengan studi kebudayaan.

### **Pendekatan Politik-Ekonomi Media** *Sejarah dan Pengertian Pendekatan Ekonomi Politik*

Pendekatan ekonomi-politik kritis dikembangkan di fakultas ilmu sosial oleh para ahli yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, ilmu politik dan sosiologi. Pendekatan ini terutama mendapat pengaruh dari Teori Marxis, namun demikian dalam perjalanannya telah berkembang berbagai varian pendekatan ini. Menurut Chandler (1998), pendekatan Neo Marxist banyak digunakan oleh teoritis media pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Teori Marxist cenderung menekankan peranan media massa dalam mereproduksi status quo, sebagai kebalikan dari kelompok pluralis media yang menekankan pada peranan media dalam meningkatkan kebebasan berbicara yang merupakan perspektif dominan di Amerika sejak tahun 1940-an.

Munculnya pendekatan Neo Marxist dalam ilmu sosial merupakan reaksi terhadap model fungsionalis dari masyarakat. Kelompok fungsionalis menjelaskan kelembagaan sosial mempunyai fungsi kohesif dalam sistem sosial-budaya yang saling terkait. Fungsionalis tidak mengakui adanya konflik, sedangkan marxisme sebaliknya menawarkan pandangan yang berguna mengenai konflik kelas. Neo marxisme berkembang terutama pada tahun 1970-an dan awal 1980-an.

Menurut Gurevitch terdapat 3 paradigma dalam pendekatan Kajian Media Marxisme yakni:

1. Kelompok “strukturalis” , antara lain adalah Althusserian Marxisme dengan fokus pada artikulasi internal dari sistem penandaan media.
2. Kelompok “*political economy*” memandang ideologi sebagai subordinat dari ekonomi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Graham Murdock yang menempatkan kekuatan media dalam proses ekonomi dan struktur produksi media. Pemilikan dan pengendalian media dilihat sebagai faktor kunci dalam mengendalikan pesan media.
3. Kelompok “kulturalis” yang termasuk didalamnya adalah Stuart Hall yang mewakili Culturalist Marxism mempunyai pandangan bahwa media massa bersifat habis dalam mempengaruhi pembentukan kesadaran publik (Curran et all, 1982:28 dikutip oleh Chandler, 1995). Kulturalis mengikuti strukturalis dalam hal menolak *economism*, tetapi tidak seperti *structuralism*, pendekatan ini menekankan pada pengalaman aktual; dari sub-kelompok dalam masyarakat dan mengkontekstualisasi media dalam masyarakat yang dilihat sebagai “*a complex*

*expressive totality*". Pendekatan Kulturalis tercermin dalam karya-karya *the Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) di University of Birmingham* dimana Stuart Hall pernah menjadi direkturnya. Seperti dikatakan Curran, teori-teori Marxist bervariasi dalam hal pembahasannya mengenai pengaruh media massa dan pengaruh karakteristik dan kekuasaan dari ideologi media massa.

Dalam kaitannya dengan penggunaan pendekatan politik-ekonomi dalam mempelajari komunikasi, Mosco (1996) mengelompokkannya menurut negara-negara penyelenggara penelitian yakni Amerika Utara, Eropa, dan Dunia Ketiga (Asia dan Afrika). Penelitian di Amerika Utara banyak dipengaruhi oleh Dallas Smythe dan Herbert Schiller. Pendekatannya didasarkan pada tradisi Marxian dan kelembagaan dan kurang bersifat teoritis. Motivasi penelitian yang dilakukan adalah rasa ketidakadilan akibat industri komunikasi menjadi bagian integral dari tatanan korporasi yang lebih luas yang bersifat eksploitatif dan tidak demokratis. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kepedulian publik terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Penelitian di Eropa terkait dengan gerakan-gerakan akan perubahan sosial, terutama perlawanan sistem media pelayanan publik. Kelompok ini lebih mendasarkan pada tradisi teoritis Neo-Marxian. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kelompok Garnham dan Golding dan Murdock yang menekankan kekuasaan kelas, pengintegrasian kelembagaan komunikasi dengan otoritas kebijakan dan perusahaan (bisnis) dalam ekonomi kapitalis yang lebih luas, resistensi kelas-kelas sosial dan gerakan-gerakan yang melawan praktek-praktek negara neo konservatif yang mempromosikan liberalisasi, komersialisasi dan swastanisasi industri ko-

munikasi. Kelompok lainnya, adalah karya Armand Mattelart yang menggunakan tradisi teori ketergantungan, Marxisme Barat dan pengalaman dunia dari gerakan liberalisasi untuk memahami komunikasi sebagai salah satu sumber-sumber utama resistensi terhadap kekuasaan.

Penelitian dunia ketiga, merangkum berbagai pendekatan dengan penekanan utama sebagai respons terhadap modernisasi dan paradigma *developmentalist* yang berasal dari Barat terutama USA. Kelompok ini menggabungkan komunikasi ke dalam bentuk paradigma penjelasan yang bersifat simpatik untuk memancing perhatian politik dan intelektual. Pertumbuhan media dilihat sebagai bagian dari indeks pembangunan. Pendekatan yang digunakan beragam yakni teori ketergantungan, sistem dunia, dan ekonomi politik Neo Marxian. Pendekatan Ekonom politik di Dunia Ketiga mempertanyakan premis dasar model ini, terutama determinisme teknologi dan penghilangan kepentingan praktis dalam hubungan kekuasaan yang membentuk istilah-istilah pertukaran ekonomi dan sosial antara bangsa-bangsa Dunia Pertama dan Ketiga dan hubungan kelas antar lapisan.

Menurut *The New Palgrave* (Mosco, 1996) politik-ekonomi adalah ilmu mengenai kesejahteraan dan berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi dan memuaskan keinginannya. Sedangkan Mosco sendiri memberi pengertian politik-ekonomi sebagai studi mengenai relasi-relasi sosial terutama relasi kekuasaan, yang secara bersama-sama mendasari produksi, distribusi dan konsumsi sumberdaya.

Menurut Chandler (1998) analisis Marxist mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan-kekuatan teori kritis Marxis adalah :

1. Membukakan mitos mengenai pendekatan ilmu sosial yang bebas nilai.
  2. Menunjukkan pada issue-issue kepentingan ekonomi dan politik dalam media massa dan penekanannya mengenai ketimpangan sosial dalam representasi media.
  3. Menempatkan teks media dalam formasi sosial yang lebih besar.
  4. Mendekonstruksi nilai-nilai yang telah kita anggap benar, karena fokus perhatiannya pada sifat ideologi. Analisis ideologi membantu kita untuk membuka realitas kelompok sosial mana yang ditawarkan oleh media dengan melakukan analisis representasi dalam media massa untuk mengungkapkan ideologi-ideologi yang mendasarinya.
  5. Mempelajari mitos individu yang bersifat otonomi (Marxisme Althusserian).
  6. Membuka pada kemungkinan pembacaan teks yang berbeda, karena melihat media massa sebagai suatu tempat pergulatan bagi pemaknaan ideologis (Neo Marxist yang lainnya).
  7. Menekankan pada pentingnya kelas sosial dalam hubungannya dengan kepemilikan media dan interpretasi khlayak terhadap teks media. Sebagai perbandingan, analisis isi dan semiotik lebih menekankan pada isi media, sedangkan teori Marxis lebih menekankan pada aspek material dari produksi dan penerimaan media. Status sosial ekonomi seseorang akan mempengaruhi akses terhadap media dan selanjutnya mempengaruhi cara interpretasi isi media.
- Selain memiliki kekuatan-kekuatan, analisis Marxist memiliki keterbatasan – keterbatasan berikut :
1. Marxisme juga merupakan suatu ideologi (walaupun terdapat klaim oleh sejumlah orang bahwa materialisme historis merupakan ilmu yang obyektif), sejumlah pendekatan Marxist terlanjur mendoktrinasi.
  2. Marxisme yang fundamentalis bersifat sangat deterministik dan juga reduksionis dalam hal materialisme dan hanya memberikan sedikit perhatian pada manusia dan subjektivitas.
  3. Marxisme senantiasa dilihat sebagai “*grand theory*” yang mengabaikan penelitian empiris. Namun demikian, penelitian dalam tradisi *Marxist Political Economy* menggunakan metode empiris.
  4. Dalam pandangan Marxis ortodok mengenai kesadaran palsu menyiratkan adanya suatu realitas yang tidak terdistorsi oleh mediasi. Gagasan mengenai kesadaran yang dipengaruhi oleh khlayak massa tidak memungkinkan pembacaan teks yang berlawanan.
  5. Perspektif Marxist klasik cenderung mengabaikan sifat polisemi dari makna. Namun demikian, sikap Neo Marxis berusaha menghindari jebakan ini.
  6. Pendekatan Marxist cenderung pada pembagian sosial berdasarkan pengelompokan kelas sosial dan kurang memperhatikan pengelompokan lainnya seperti gender dan etnisitas.
- Karakteristik Umum dari Politik-ekonomi*
- Pendekatan Ekonomi Politik mempunyai ciri khas utama sebagai berikut (Mosco, 1996):
1. Bersifat historis, karena berusaha memahami perubahan sosial dan transformasi sejarah dalam kaitannya dengan momen-momen ekonomi, politik, budaya dan ideologi dari kehidupan sosial dengan dinamika yang berakar dari konflik sosial ekonomi. Proses-proses

historis yang penting bagi ekonomi politik budaya adalah pertumbuhan media, perluasan jangkauan korporasi, komodifikasi, perubahan peran negara dan intervensi pemerintahan.

2. Analisis totalitas sosial atau holistik. Hal ini berarti bahwa politik ekonomi membahas masalah-masalah dalam kaitan dengan disiplin ilmu lain (sosiologi, politik dan ekonomi dll). Oleh karena itu seluruh arena sosial merupakan bidang analisis politik-ekonomi. Dalam kaitan dengan Marxian, totalitas itu berarti memahami hubungan politik dan ekonomi, juga bidang sosial dan budaya yang lebih luas. Sebagai contoh mempelajari dampak dinamika ekonomi terhadap keragaman ekspresi budaya publik dan ketersediaannya bagi kelompok sosial tertentu.
3. Berorientasi pada moral. Artinya mengacu pada konsepsi nilai-nilai sosial dan konsepsi mengenai praktek-praktek sosial yang pantas. Masalah moral mendasar yang menjadi perhatiannya adalah mengenai keadilan, kesetaraan, dan barang publik (*public good*). Kajian ekonomi politik media tidaklah bersifat bebas nilai dalam arti kajiannya didasari oleh kepentingan memperjuangkan keadilan, kesamaan dan kepentingan umum.
4. Orientasi praksis, yakni kajian ekonomi politik media diarahkan pada suatu tindakan yang mempunyai implikasi praktis. Dengan demikian kajian ekonomi politik dibangun oleh teori dan praktek. Kajian ekonomi politik media dimaksudkan untuk kepentingan praktis yang tercermin dalam tindakan perjuangan kelas.

Goulding dan Murdock (1998) menambahkan karakteristik lainnya yakni kajian ekonomi politik media juga

mempunyai perhatian terhadap keseimbangan antara usaha kapitalis dan intervensi publik.

Tiga area dalam ekonomi politik komunikasi menurut Goulding dan Murdock (1998) adalah:

1. Hubungan antara produksi barang-barang budaya dengan pentingnya anggapan keterbatasan (tetapi tidak sepenuhnya menentukan) dampak dari produksi budaya terhadap konsumsi budaya.
2. Ekonomi politik dari teks yakni untuk menggambarkan bagaimana representasi berhubungan dengan ekonomi politik dari konsumsi budaya.
3. Ekonomi politik konsumsi budaya, untuk menggambarkan hubungan antara benda-benda dengan ketidakdaksamaan budaya dimana ekonomi politik khususnya dialamatkan.

Analisis ekonomi-politik menurut Goulding dan Murdock (1996) berkenaan dengan produksi makna sebagai praktek kekuasaan, analisis tekstual dan konsumsi media.

**Produksi makna sebagai praktek kekuasaan.** Perkembangan ekonomi dan teknologi telah menggeser status masyarakat sebagai warga politik menjadi unit konsumsi dalam masyarakat korporasi. Pertanyaan penting dari ekonomi politik komunikasi adalah bagaimana perubahan-perubahan berbagai kekuatan termasuk di dalamnya praktek-praktek kekuasaan terhadap produksi dan distribusi budaya membatasi atau memperluas ruang publik. Dua issue kunci berkenaan dengan hal tersebut adalah (1) pola kepemilikan institusi dan akibatnya pada pola penguasaan terhadap aktivitas mereka. (2) Karakteristik hubungan antara pengaturan oleh negara dan lembaga komunikasi.

**Ekonomi Politik dan Analisis Tekstual.** Bentuk-bentuk kebudayaan

(iklan layanan kesehatan, berita, laporan, atau program diskusi interaktif) merupakan mekanisme untuk mengatur wacana publik. Terdapat dua dimensi proses ini yakni (1) sejauh mana ragam wacana dengan bentuk tertentu memberi tempat pada wacana resmi atau artikulasi wacana alternatif (2) sejauh mana wacana yang disampaikan dalam teks memungkinkan khalayak untuk memilih bentuk yang diinginkannya atau seberapa terbuka pilihan yang diberikan kepada khalayak.

**Konsumsi -- kebebasan atau perjuangan.** Sebagai reaksi terhadap pandangan khalayak sebagai penonton pasif dari media, maka muncul pandangan bahwa terdapat pandangan kebebasan khalayak dalam pemberian makna atau makna bersifat polisemi. Bagi kelompok liberal pluralis ini memperbaiki pandangan mengenai penyeimbangan terhadap penawaran dan permintaan kebudayaan, karena khalayak masih memiliki kemerdekaan. Bagi penulis yang kritis dan radikal pandangan ini merupakan romantisme golongan populis.

Kemerdekaan total konsumen adalah tidak mungkin – tidak seorangpun mempunyai akses terhadap segala hal tanpa batasan. Tugas ekonomi politis adalah mempelajari hambatan-hambatan yang membatasi kebebasan ini. Hambatan tersebut bersifat material dan budaya. Secara material, barang-barang dan fasilitas komunikasi tersedia dengan harga tertentu yang hanya dapat diakses oleh pembeli yang mempunyai uang untuk itu. Selain itu, secara material status suatu media dapat mempengaruhi pola konsumsi kelompok tertentu. Perubahan dari status barang publik menjadi barang pribadi mempunyai implikasi besar bagi kelompok-kelompok “miskin” dalam mengakses barang-barang tersebut. Sebagai contoh, suatu saluran televisi hanya dapat di-

akses oleh orang-orang kaya karena harus menggunakan parabola. Secara budaya, posisi sosial mengatur akses terhadap kompetensi budaya yang diperlukan untuk menginterpretasi dan menggunakan benda-benda fisik media dengan cara tertentu. Tradisi empiris yang ada dalam studi kebudayaan adalah subbudaya pemuda mempunyai cara menginterpretasi pesan dengan cara berbeda.

### **Pendekatan Studi Budaya** *Sejarah dan Pengertian Studi Kebudayaan*

Studi kebudayaan menyangkut pada cara-cara budaya diproduksi melalui pergulatan ideologi-ideologi. Kelompok studi budaya yang terkenal adalah *British Cultural Studies* yang bekerjasama dengan *the Centre for Contemporary Cultural Studies* pada *Universitas Of Birmingham*. Asal muasal tradisi ini adalah dapat ditelusuri pada tulisan-tulisan *The Uses of Literacy* oleh Richard Hoggart (1957), *Culture and Society* oleh Raymond William. Dengan perkataan lain muncul dari disiplin kesusasteraan. Sejak awal perkembangannya, studi kebudayaan Inggris bersifat sangat politis dan memfokuskan pada potensi-potensi resistensi dalam subbudaya seperti budaya kelas pekerja, subbudaya pemuda terhadap bentuk-bentuk hegemoni dari dominasi kapitalis. Tetapi studi kebudayaan Inggris, tidak seperti Frankfurt School, tidak terlalu terlibat dengan modernis dan gerakan estetika *avant garde*, dan membatasi fokusnya pada produk-produk budaya media dan pop yang menjadi fokus utamanya.

Belakangan ini ada kecenderungan masalah postmodernisme yang cenderung menekankan kesenangan, konsumsi dan konstruksi individu terhadap

identitas yang dalam terminologi Mc-Guigan (1992) disebut sebagai "*cultural populism*". Budaya media dengan perspektif ini menghasilkan benda-benda untuk identitas, kesenangan, dan pemberdayaan dan khalayak menciptakan budaya populer melalui konsumsi mereka terhadap produk budaya.

Sejak tahun 1980 hingga saat ini -- studi kebudayaan di Inggris dan Amerika Utara berubah bentuk dari sifat politik sosialis dan revolusioner menjadi bentuk politik identitas dan kurang bersifat kritis mengenai media dan budaya konsumen. Dengan demikian terdapat penekanan yang semakin besar pada khalayak, konsumsi, dan penerimaan dan meninggalkan fokus perhatian pada produksi dan distribusi teks dalam industri media.

Tradisi studi kebudayaan mempunyai orientasi reformis dan kritis. Kelompok sarjana ini ingin melihat perubahan masyarakat Barat, dan mereka memandang madzabnya atau aliran-nya sebagai instrumen perjuangan kelas. Mereka yakin bahwa perubahan ini dapat ditempuh melalui dua cara (1) mengidentifikasi kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat, pemecahan terhadap kontradiksi-kontradiksi tersebut akan mengarah pada perubahan yang positif sebagai lawan dari perubahan yang menindas, (2) dengan memberikan interpretasi yang akan membantu orang untuk memahami dominasi dan jenis perubahan yang diinginkan. (Littlejohn, 1999)

Studi mengenai komunikasi massa merupakan pusat perhatiannya karena media dilihat sebagai alat bagi ideologi dominan. Sebaliknya media juga dapat menjadi alat potensial untuk meningkatkan kesadaran kelas, kekuasaan dan dominasi.

Studi Kebudayaan mewakili gambaran kecenderungan studi baru mengenai kebudayaan yang sejalan dengan postmodernisme (Mosco, 1996). Oleh

karena itu, dalam kaitannya dengan filsafat maka kajian studi kebudayaan merupakan bagian dari postmodernisme. Burgesss (1990) seperti dikutip oleh Mosco mengemukakan bahwa studi-studi kebudayaan merupakan gerakan intelektual yang berkon-sentrasi pada pembentukan makna dalam teks dan didefisisikan secara luas termasuk semua bentuk komunikasi sosial. Pada awalnya studi kebudayaan mendapat pengaruh yang cukup kuat dari pendekatan Marxis. Termasuk kecenderungan untuk melihat budaya sebagai terkait dengan hubungan sosial, terutama terkait dengan kelas, gender dan ras khususnya dalam kaitannya dengan sifat asimetris dan antagonisme. Selanjutnya, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa budaya tidaklah independen dan tidak ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi lebih sebagai situs perbedaan, pergulatan, dan perjuangan sosial.

#### *Karakteristik Studi Kebudayaan*

Karakteristik sentral studi kebudayaan (Mosco, 1996) adalah

1. Kritik terhadap positivisme sebagai satu-satunya pendekatan dalam ilmu pengetahuan yang subyektif dan sosial.
2. Pandangan bahwa budaya adalah merupakan produk sehari-hari, diproduksi oleh aktor sosial tidak hanya kelompok elit. Walaupun demikian, studi kebudayaan mengakui adanya pengaruh gender dan identitas kebangsaan.
3. Menolak pemikiran yang bersifat sejarah dan totalitas sosial.
4. Studi kebudayaan melihat akibat-akibat tidak langsung dari kapitalis dan hubungan sosial lainnya dalam aturan-aturan yang ada mengenai bahasa dan wacana, khususnya perjuangan kelas dan gender dalam

efeknya ke simbol dan tanda-tanda sosial yang berbeda.

Sedangkan Hebdige (1988) seperti dikutip oleh Morley (1996) berpendapat bahwa proyek postmodern melawan pandangan-pandangan dalam modernisme yakni

1. Anti totalitas berupa penolakan terhadap klaim-klaim universal misalnya mengenai kebenaran, konsep abstrak keadilan atau masyarakat. Postmodernisme lebih meyakini pergulatan lokal, issue-issue yang bersifat partikularistik atau micro-politics menurut Foucault (1980).
2. Anti teleologi berupa penolakan terhadap “model kedalaman” seperti kebenaran tersembunyi seperti dalam klaim Marx mengenai relasi ekonomi yang tersembunyi dibalik penampakan ideologi, klaim psikoanalisa mengenai motif alam bawah sadar dibalik aktivitas sehari-hari, dan klaim strukturalisme mengenai pola-pola dibalik bahasa dan budaya. Sebagai gantinya Postmodernisme mengajarkan konsep penampakan (*appearance*).
3. Anti utopia berupa penolakan terhadap misi yang dibawa oleh modernisme seperti kesejahteraan.

Menurut Golding and Murdock (1991) perspektif studi kebudayaan berkenaan dengan konstruksi makna -- bagaimana makna diproduksi khususnya melalui bentuk-bentuk ekspresif dan bagaimana secara berkelanjutan dinegosiasikan dan dekonstruksi melalui praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Terdapat tiga kelompok studi kebudayaan yakni (1) analisis teks budaya termasuk yang didalamnya diproduksi oleh media. Sebagai kebalikan dari model transportasi yang memandang media sebagai sarana memindahkan pesan pada konsumen, studi kebudayaan melihat media sebagai mekanisme untuk menata makna dengan cara tertentu. Dalam ana-

lisis isi makna sebagai sesuatu yang telah terdefinisikan secara terbatas yang terpisah posisinya dari teks atau hubungan program terhadap teks yang lainnya, studi kebudayaan berpendapat bahwa makna beragam dan tergantung pada konteks yang diberikan oleh narasi secara keseluruhan, genre program dan publisitas sebelumnya yang mengitari pertunjukkan dan bintang. (2) Dimensi relasional dari makna dengan perhatian pada bagaimana khalayak menginterpretasikan media dan menggabungkan-nya dalam pandangan dunianya dan gaya hidupnya. Ini melihat khalayak sebagai subyek aktif, yang senantiasa bergulat untuk memahami situasinya daripada sebagai obyek pasif dari sistem produksi dominan (3) Supremasi konsumen yang mempunyai pusat perhatian pada momen pertukaran pada saat makna yang dibawa oleh teks bertemu dengan makna yang dibawa oleh pembaca. Tipe ini memisahkan diri dari konteks yang lebih luas dan melihat supremasi konsumen dalam menentukan makna. Menurut Fiske, studi kebudayaan mempunyai ciri lari dari ideologi, kekuasaan “*bottom up*” untuk menentang *top down* dan disiplin ilmu sosial berhadapan dengan kekacauan.

Berdasarkan pengelompokan geografis, studi kebudayaan di Inggris cenderung menganut pendekatan Marxian atau politik sedangkan pendekatan Amerika cenderung pluralistik, dan mempunyai karakter afirmatif yakni pernyataan yang tidak terkait dengan politik dan mempunyai pandangan yang absolut mengenai khalayak.

Terdapat kritik-kritik terhadap studi kebudayaan terutama dari kelompok kajian politik ekonomi media atau kelompok studi kebudayaan yang lebih banyak dipengaruhi oleh



Marxis (Mosco, 1996 ; Golding dan Murdock, 1991):

1. Studi kebudayaan tidak dapat menjelaskan bagaimana industri kebudayaan bekerja dan pengorganisasian ekonomi mempengaruhi produksi dan sirkulasi makna, juga tidak menjelaskan bagaimana pilihan konsumen distruktur oleh posisinya dalam struktur ekonomi yang lebih luas. Walaupun William sebagai seorang teoritis kebudayaan juga menekankan “ *we should look not for the components of a products but for the conditions of a practice*”.
2. Tidak menggunakan tradisi etnografi yang benar. Menurut Spiro seperti dikutip oleh Weiss dan Wesley (<http://www.as.ua.edu/ant/Faculty>) berpendapat bahwa antropologis postmodern tidak dapat meninggalkan metode ilmiah, karena dengan demikian tidak dapat menemukan penyebab-penyebab suatu fenomena sosial.
3. Studi kebudayaan cenderung tidak meyakini anggapan bahwa kesatuan sosial dan masyarakat, walaupun itu ada lebih karena sebagai suatu kebetulan. Politik ekonomi tidak sependapat dengan kesimpulan bahwa keberagaman merupakan akibat alamiah keberagaman unit media dan khalayak. Ekonomi politik mengakui adanya polisemi makna dan produksi beragam teks, mengakui kebutuhan menganalisa rangkaian penuh produksi, distribusi dan konsumsi, dan melihat hal ini merupakan kejadian penting dalam mewujudkan nilai-nilai dan konstruksi kehidupan sosial.
4. Terjebak dalam romantisme perbedaan. Bagi Studi Kebudayaan keragaman media bukanlah masalah substansial karena informasi dan hiburan bersifat polisemik atau tunduk pada pembacaan atau interpretasi yang oleh karenanya menciptakan keragamannya sendiri berapapun jumlah produser dan distributor media. Kecenderungan Studi Kebudayaan melihat setiap penerima pesan sebagai produser yang memberi makna yang berbeda dan merupakan fungsi dari posisi subyektif tertentu dari penerima dalam identitas yang saling tumpang tindih yang membentuk kehidupan sosial. Keragaman pengalaman subyektif khalayak komunikasi dan produk informasi menghasilkan keragaman tekstual.
5. Studi kebudayaan tidak jelas sikapnya atau komitmennya terhadap tujuan suatu proyek politis, walaupun secara eksplisit dia juga menunjukkan adanya perhatian masalah politik yakni dengan mengangkat issue gender dan issue ras, dan kebangsaan. Studi kebudayaan cenderung menekankan dimensi intersubyektif, pribadi dan lokal. Studi Kebudayaan juga tidak menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang sentral dalam mengkaji hubungan sosial. Konsepsi kekuasaannya cenderung berakar dari subyektivitas individual, identitasnya dan tindakan kolektif. Studi kebudayaan mengajukan issue hegemoni, *populism authoritarian*, juga pembentukan perlawanan oposisi dan gerakan alternatif. Poststrukturalisme memandang realitas terbatas pada konstruksi teks dan *discourse*, sehingga sulit menghubungkan dengan kekuasaan.
6. Studi kebudayaan juga kurang memandang penting pemahaman totalitas sosial. Sebagai gantinya studi ini lebih memusatkan pada perbedaan budaya, subyektivitas partikular, identitas lokal, tidak memperhatikan bahwa keterkaitan dapat muncul dalam sistem dan bentuk-bentuk objektifikasi yang

dapat menenggelamkan bagian-bagian, sesuatu hal yang mempunyai justifikasi istimewa dalam epistemologi budaya.

7. Terdapat bahaya menekankan pada perbedaan, subyektivitas, dan bagian-bagian dapat berakhir pada keberagaman individualisme yang mempunyai hubungan-hubungan, tidak hanya sekedar kejadian kebetulan, yang secara ekstrem dinyatakan sebagai randomisasi umum sehingga sejarah, politik dan ideologi gugur (Wood, 1986). Nilai signifikansi hal tersebut kecil dibandingkan dengan ketimpangan kekuasaan khalayak yang menyebabkan mereka terpisah dari kehidupan material dan budayanya (Mosco, 1996).
8. Pemikiran-pemikiran dalam rangka merevisi kemodernan itu cenderung kembali ke pola pikir pra modern.

Roy D'Andrade seperti dikutip oleh Weiss dan Wesley (<http://www.as.ua.edu/ant/Faculty>) dalam artikel "*Moral Models in Anthropology*" mengkritik definisi postmodernisme mengenai obyektivitas dan subyektivitas dengan melihat pada konsep dibalik model moral. Menurut dia model moral sangatlah subyektif. Walaupun obyektivitas bebas nilai adalah tidak mungkin, adalah tujuan seorang antropog untuk melakukannya seobyektif mungkin. Menurut dia terdapat pemisahan antara antara model moral dan model obyektif. Karena "kedua model itu tidak dapat menemukan bagaimana dunia berjalan". Obyektivitas sama sekali tidaklah bersifat mendehumanisasi juga tidak mungkin bersifat obyektif. Ilmu pengetahuan berfungsi bukan karena ilmu pengetahuan menghasilkan nilai yang tanpa bias, tetapi karena nilai-nilainya bersifat cukup obyektif untuk membuktikan atau menolak kebenaran, tidak peduli kebenaran apa yang diinginkan seseorang.

Rosenau seperti dikutip oleh Weiss dan Wesley (<http://www.as.ua.edu/ant/Faculty>) menginterpretasikan 7 kontradiksi dalam Postmodernisme:

1. Sikap teoritisnya adalah anti teori.
2. Postmodernisme menekankan irasionalitas, instrumen logika bebas digunakan dalam perspektif ini.
3. Postmodernisme yang memfokuskan pada kelompok marginal mempunyai penekanan yang bersifat evaluatif.
4. Postmodernisme menekankan intertekstualitas, tetapi seringkali teks dikaji dalam isolasi.
5. Dengan menolak kriteria modern untuk menilai teori, postmodernisme tidak dapat berpendapat bahwa tidak ada kriteria valid untuk menilai.
6. Postmodernisme mengkritisi ketidakkonsistenan modernisme, tetapi menolak untuk konsisten dalam memegang norma-norma mereka.
7. Postmodernisme berkontradiksi di antara mereka sendiri dengan meninggalkan klaim-klaim kebenaran dalam tulisan mereka sendiri.

### **Pendekatan Ekonomi Politik Media dan Studi Kebudayaan: Suatu Pelajaran**

Untuk mengembangkan kedua jenis kajian, maka di antara kedua kajian tersebut perlu saling mempelajari pendekatan dari bidang lainnya. Hal itu dapat dilakukan apabila masing-masing pendukung tersebut mempunyai sifat keterbukaan. Proses saling melengkapi dapat terjadi apabila diantara keduanya terdapat titik temu yakni persamaan-persamaan (substansi yang dipelajari dan landasan filosofisnya). Mengingat kedua kajian tersebut mempunyai varian-varian, maka dalam kaitan dengan

mengkombinasikan kedua pendekatan dapat dilakukan yakni antara pendekatan ekonomi politik kritis varian neo Marxis (Mosco, Golding dan Murdoch dll) dan studi kebudayaan varian neo Marxis (Stuart Hall).

Antara studi kebudayaan dan ekonomi politik media kritis mempunyai kesamaan karena sifat kritisnya (Payne, 1999) yakni:

1. Pandangan mengenai subyektivitas yakni pada dasarnya manusia tidak bisa subyektif yang mengandaikan adanya kebebasan, karena manusia terlahir dalam situasi dan kondisi tertentu (bahasa, budaya, ras, politik gender dan kelas tertentu).
2. Pandangan mengenai kesadaran bahwa kesadaran bisa tersembunyi dan tidak hanya yang nampak dalam permukaan.
3. Pandangan mengenai ideologi yang dibentuk oleh kesadaran yang mencengkeram subyek dan sekaligus membelenggunya hanya bisa dilawan dengan kritik atau revolusi sosial dengan manipulasi bentuk-bentuk superstruktural dari kebudayaan – pendidikan, media, agama dan seni – bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh orang-orang yang tunduk pada manipulasi tersebut.
4. Kritik dan polysemi. Apabila memang kesadaran dapat dimengerti sebagai substansi ideologi, pendidikan sebagai media hegemoni, dan intelektual sebagai agen yang tidak menyadari adanya penindasan tanpa pergolakan, maka setiap usaha manusia untuk mengetahui atau menterorisasi proses masyarakat harus mulai dengan kritik radikal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan perubahan sosial. Kritik ideologi nampak dalam bentuk kritik-kritik feminis, pasca kolonial dan anti rasis. Konsep polisemi ini merupakan sarana atau sumberdaya yang bersifat dekonstruktif untuk mengkritik ideologi.

logi. Sumberdaya ini dapat ditemukan dalam teks kritik untuk *appropriation* oleh ideologi dominan.

Menurut Kellner (1997) persamaan antara *British Cultural Studies* (khususnya dari varian Marxism) dan *Frankfurt School*:

1. Mempelajari kondisi-kondisi penderitaan (*catastrophe*) dalam proyek Marxian dari revolusi.
2. Budaya massa mempunyai peranan penting dalam mengintegrasikan kelas pekerja ke dalam masyarakat kapitalis dan bahwa konsumen baru dan budaya media tengah membentuk mode baru dari hegemoni kapitalis.
3. Kedua tradisi juga memfokuskan persilangan (*intersection*) antara budaya dan ideologi dan melihat kritik ideologi sebagai sesuatu yang sentral dalam studi kebudayaan yang kritis.
4. Keduanya melihat budaya sebagai tipe reproduksi dan hegemoni ideologis, dimana bentuk-bentuk budaya membantu membentuk pemikiran dan perilaku yang mempengaruhi individu-individu untuk beradaptasi terhadap kondisi-kondisi sosial dari masyarakat kapitalis.
5. Keduanya melihat budaya sebagai kekuatan resistensi terhadap masyarakat kapitalis dan keduanya melihat budaya tinggi sebagai kekuatan resistensi terhadap modernitas kapitalis.
6. Keduanya berpandangan bahwa budaya harus dipelajari dalam konteks relasi sosial dan sistem melalui mana budaya diproduksi dan dikonsumsi karena kajian budaya terkait dengan kajian masyarakat, politik dan ekonomi.
7. Keduanya percaya pada proyek usaha transdisipliner yang tidak ter-

lalu meyakini adanya pembagian disiplin akademik.

Kellner (1997) yakin bahwa antara studi kebudayaan dengan politik ekonomi perlu ada penggabungan konsep khalayak yang aktif dan dimanipulasi untuk menangkap beragam efek media untuk menghindari elitisme budaya dan populisme budaya. Berangkat dari pernyataan tersebut maka untuk memperbaiki masing-masing pendekatan, pendekatan ekonomi politik media perlu menggunakan konsep-konsep khalayak yang aktif dari studi kebudayaan dan sebaliknya pendekatan studi kebudayaan menggunakan konsep khalayak yang dimanipulasi oleh kondisi sosial (ekonomi, politik dan budaya) dari pendekatan ekonomi politik media. Oleh karena itu untuk mengkaji media hendaklah dilihat dalam kaitan sirkuit produksi, distribusi dan konsumsi media (pesan).

Untuk menggabung dua pendekatan tersebut akan lebih mudah apabila menggunakan *entry point* dari ekonomi politik media yang dianut oleh Mosco (1996) dengan ciri epistemologinya yang realis, inklusif dan kritis atau yang disebut *integral epistemology*. Realisme didasarkan pada pandangan bahwa terdiri dari lebih dari satu rangkaian kategori nominal yang ditentukan secara subyektif dari kategori-kategori ideal. Inklusif, terbuka dan non reduksionis, berarti bahwa seluruh kehidupan sosial tidak dapat dirangkum dalam satu teori. Kedua, tidak ada satu pendekatan yang benar. Ekonomi politik hanyalah *entry point* untuk mendalami bidang lainnya seperti studi kebudayaan dan studi kebijakan. Dengan demikian secara spesifik, sifat realitas sosial *multiple determination* atau relatif mandiri tetapi juga interaktif.

Ekonomi politik mengacu pada produksi dan distribusi budaya yang terjadi dalam sistem ekonomi tertentu, yang dibentuk dari hubungan antara

negara, ekonomi, media, lembaga sosial dan praktek-praktek sosial, budaya dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian produksi budaya bersifat *market oriented*. Kekuatan-kekuatan produksi (seperti teknologi media dan kegiatan kreativitas) diorganisir menurut relasi dominan dari produksi yang penting dalam menentukan benda budaya apa yang diproduksi dan bagaimana dikonsumsi. Sistem produksi sering menentukan jenis benda apa yang diproduksi, keterbatasan-keterbatasan struktural akan menentukan apa yang dapat dikatakan atau ditunjukkan dan apa harapan khalayak.

Struktur ekonomi akan mengkode (*encoding*) dan mendekode (*decoding*). Dalam sistem yang komersial dari budaya media, produksi diorganisir menurut genre yang telah terdefiniskan dengan kode tersendiri dan moda produksi tersendiri. Karena bentuk-bentuk budaya distruktur oleh aturan dan konvensi-konvensi yang telah mapan, studi mengenai kajian produksi budaya dapat membantu menjelaskan kode-kode yang bekerja, sehingga dapat menjelaskan jenis teks yang diproduksi. Sebagai contoh, karena permintaan radio dan televisi kebanyakan musik pop berdurasi 3-4 menit sesuai dengan sistem distribusi. Contoh lainnya, karena dikendalikan oleh perusahaan yang terutama berorientasi pada profit, stasiun-stasiun televisi di Indonesia banyak menayangkan sinetron dari Amerika Latin atau Thailand yang harganya murah. Sedangkan apabila diproduksi oleh *production house* tema-tema yang diajukan adalah tema yang layak jual seperti cerita-cerita rakyat, *soap opera* dll.

### **Simpulan**

Kajian terhadap media massa baik dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik media atau studi kebudayaan perlu mengembangkan pendekatan multiperspektif yang mencakup beragam artifak dengan mengumpulkan informasi secara mendalam tiga dimensi dari (1) produksi dan ekonomi politik dari budaya (2) analisis tekstual dan kritik terhadap artifaknya dan (3) kajian mengenai penerimaan khalayak dan penggunaan produk budaya/media.

Kajian media massa hendaknya bersifat multiperspektif, atau penggunaan metoda kritis pada saat menggunakan analisis tekstual dan dalam menggambarkan keanekaragaman posisi atau perspektif subyek, melalui mana khalayak menerima/menyesuaikan diri dengan budaya. Hasil kajian tersebut hendaklah diinterpretasikan dan dikontekstualisasikan dalam teori sosial kritis untuk menggambarkan maknanya dan efeknya. Dengan demikian keterkenalan Sherina atau Yoshua tidak hanya perlu dikaji pada makna, efek, dan penggunaannya oleh khalayak mereka, tetapi kepopuleran Sherina atau Yoshua merupakan bagian strategi pemasaran dan produksi video musik dan image yang dapat menarik beragam khalayak.

Perspektif yang komprehensif melintasi ekonomi politik, analisis tekstual, penelitian khalayak memberikan perspektif politik dan kritis yang memungkinkan individu mempelajari makna, pesan, dan efek dari bentuk-bentuk budaya dominan. Kajian media secara kritis merupakan bagian dari pendidikan media kritis yang memungkinkan individu untuk melawan manipulasi media dan untuk menambah kemerdekaannya dan individualitasnya. Ini juga dapat memberdayakan orang untuk memperoleh kemerdekaan/otonomi terhadap budayanya dan dapat berjuang untuk

memperoleh budaya alternatif dan perubahan politis (Kellner, 1997).

### **Daftar Pustaka**

- Chandler, Daniel. (1998). *Marxist Media Theory*". available at <http://www.aber.ac.uk/>.
- Fiske, John. (1994). *Audiencing: Cultural Practice and Cultural Studies* dalam Lincoln, YS dan Denzin, NK. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications, Inc. Thousand Oaks, London, India.
- Golding and Murdock. (1991). "Culture Communication, and Political Economy" dalam Curran dan Gurevitch (pp 15 –32)
- Jameson, Frederic. (1997). *Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism*. Duke University Press. USA. (pp ix –xxii, pp 55-66, 181-259).
- Kellner (1997), *The Frankfurt School and British Cultural Studies: The Missed Articulation*". Final version 1/1/97. Available at <http://www.gseis.ucla.edu/ed253a>.
- Littlejohn, SW. (1999). *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company. New Mexico.
- Morley, David. (1996). *Postmodernism: The Rough Guide* dalam Cultural Studies and Communications. Arnold. London, New York.
- Mosco, Vincent. (1996). *The Political Economy of Communication*. Sage Publications. London, Thousand Oaks, New Delhi. (pp17-134 & pp 246-272).
- Payne, M . (1996). *Some Version of Cultural and Critical Theory* dalam *A Dictionary of Cultural and Critical Theory*. Blackwell Publisher Inc. Cambridge. USA (pp.1-11).

*Perbandingan Pendekatan  
Ekonomi-Politik Media dan Studi Kebudayaan dalam Kajian Komunikasi Massa*

Weiss, Shannon dan Karla Weley.  
(2001). Postmodernism and Its  
Critics. [http://www.as.ua.edu-  
/ant/Faculty](http://www.as.ua.edu-<br/>/ant/Faculty).